



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANIK PURWANTI**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **217679**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.113.200.000**

1. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.348.200.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 740 m2/75 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/45 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 21.3 m2/21.3 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 433.000.000**

1. MOTOR, KAWASAKI MOGE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, NISSAN PATROL Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. MOTOR, VESPA PIAGGIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SKUTIK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 6.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	400.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.952.200.000
III. HUTANG	Rp.	410.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.542.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.